

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah kepemimpinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang memiliki arti “memimpin”. Sedangkan kata pemimpin itu sendiri memiliki makna “orang yang memimpin”. Jadi, kepemimpinan adalah cara untuk memimpin.¹ Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil, sebagaimana yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ



Terjemahannya:

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih, memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui"²

Tafsirannya:

Ayat ini menyampaikan bahwa Allah telah memberitahukan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan khalifah di bumi. Khalifah di sini berarti, kaum yang silih berganti menghuni dan menguasai bumi. Para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di muka bumi. Maka mereka bertanya, “Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah.” Dari pertanyaan malaikat ini sebenarnya hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka untuk menjawab pertanyaan malaikat ini, Allah SWT. berfirman “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” Yang artinya, Aku lebih mengetahui hikmah, masalah apa yang tidak kamu ketahui, sebab Aku juga akan menjadikan para Nabi, Rasul, Siddiqin, Syuhada’, dan Salihin yang benar-benar taat mengikuti ajaran Tuhan dan jejak Nabi-nabi a.s.³

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 4, (Cet. 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1075.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Al-Fatih, 2013), h. 6.

³H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsier*, Jilid I, Cet. 2, (Kuala Lumpur: Victory Agency, 1988), h. 80.

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah bahwa, Allah menyampaikan kepada para malaikat tentang tujuannya menciptakan khalifah di bumi yang sekalipun diketahui bahwa khalifah ini akan membuat kerusakan di bumi, akan tetapi terdapat hikmah yang sekiranya lebih diketahui oleh Allah ketimbang malaikat. Khalifah di muka bumi tidak selamanya akan membuat kerusakan, beberapa di antaranya malah akan menjadi utusan dari Allah dan menjadi wali-wali Allah di muka bumi.

Selain dari beberapa istilah di atas, disebutkan juga kata *Ulil Amri* yang satu akar dengan kata *Amir* sebagaimana disebutkan di atas. Kata *Ulil Amri* bermakna pemimpin, penguasa, ulama, atau tokoh masyarakat yang menjadi tumpuan umat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisaa' (4) ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁴

Tafsirannya:

Ayat di atas telah Allah firmankan “taatilah Allah dan taatilah Rasul dan taatilah ulil amri”. Pada ayat ini umat manusia diperintahkan untuk mentaati Allah, mentaati rasul, dan mentaati ulil amri. Ulil amri adalah “ahlul hilli wal ‘aqdi,” yaitu termasuk di dalamnya fungsionaris, seperti wakil-wakil dari pemerintah, hakim, ulama, kepala tentara, kepala polisi, dan segala orang cerdas pandai, orang-orang tua dan golongan karyawan yang semua ini adalah golongan orang Islam. Perintah mentaati Allah dan rasul berarti mengikuti dan mematuhi segala larangan dan perintah serta hukum yang tertentu dalam Kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya. Sedangkan mentaati ulil amri berarti umat manusia diperintahkan untuk mentaatinya selama mereka itu mentaati Allah dan rasul-Nya dan selama perintah mereka berdasarkan perintah Allah dan rasul-Nya. tapi kalau perintah mereka hanya berdasarkan kepada pikiran semata, tidaklah wajib mentaati

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Al-Fatih, 2013), h. 87.

perintah ulil amri itu. Sedangkan pada kalimat “jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan hari kemudian.” Ayat ini mengisyaratkan agar umat manusia memulangkan atau mengembalikan kepada Kitab Allah dan Sunnah rasul-Nya yang ada dua macam. Pertama, mengembalikan kepada *nash* (yaitu keterangan tegas) yang disebut di dalamnya. Kedua, mengembalikan kepada Kitab dan Sunnah itu dengan jalan kias, bandingan, dan umum lafaz.⁵

Ayat di atas adalah berupa ketaatan mutlak dengan memerintahkan agar manusia mentaati Allah, rasul dan ulil amri. Dalam hal ini ulil amri yang dimaksud adalah para penguasa atau pemimpin, baik dalam bidang keagamaan ataupun instansi pemerintahan. Mentaati ulil amri diwajibkan selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Segala permasalahan yang didapatkan hendaknya dikembalikan kepada Al-Qur’an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Dengan mengembalikan kepada penilaian keduanya, maka akan dapat menghasilkan penyelesaian yang lebih baik, dan langkah ini merupakan salah satu bentuk ketakwaan yang membawa akibat dengan penuh keberkahan.

Terdapat pula istilah *Auliyaa* yang berarti pemimpin yang sifatnya resmi dan tidak resmi. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Maa-idah (5) ayat 55:

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿٥٥﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya penolongmu hanyalah kalimat-kalimat Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).”⁶

Tafsirannya:

Ayat ini mengisyaratkan bahwa “*dan mereka itu rukuk (tunduk)*,” mengenai rukuk ini terdapat tiga keterangan yaitu, pertama, rukuk itu dengan arti merendahkan diri. Maka ayat ini berarti, orang yang beriman ialah orang yang mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dengan patuh dan merendahkan

⁵H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir l-Ahkam*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 283-285.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Selatan: Al-Fatih, 2013), h.

dirinya. Kedua, orang yang beriman itu ialah orang yang mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, dan shalat yang dimaksud di sini adalah shalat yang mempunyai rukuk. Walaupun shalat itu mempunyai rukun-rukun yang lain, akan tetapi dalam ayat ini dikhususkan menyebut rukuk saja, karena mulianya rukun itu dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Ketiga, ayat ini diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika sedang mengerjakan shalat dengan orang banyak dan sewaktu ia rukuk, seseorang datang meminta sedekah kepadanya, maka diberikanlah cincinnya kepada orang tersebut.

Ayat di atas merupakan penyatuan antara dua rukun Islam yaitu, shalat dan zakat.

Shalat bukan penghalang bagi seseorang untuk memberikan bantuan kepada kaum fakir miskin. Bagi orang beriman, yang tidak mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat, maka mereka tidak berhak untuk memegang atau memangku jabatan kepemimpinan.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang kepemimpinan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim no. 1199, sebagai berikut.

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: كُفُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُفُّكُمْ رَاعٍ وَكُفُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Terjemahannya:

Ibn Umar r.a berkata: Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda: “Kalian adalah pemimpin, yang akan diminta pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu, kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.⁸

Hadis di atas menjelaskan tentang etika kepemimpinan dalam Islam. Etika paling pokok dalam kepemimpinan adalah tanggung jawab. Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Oleh karena itu sebagai pemimpin, mereka semua memikul tanggung jawab, tidak terkecuali terhadap dirinya sendiri.

⁷H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir l-Ahkam*, h. 383-384.

⁸Al- Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Cet. 4, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 604.

Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjanya, seorang atasan bertanggung jawab kepada bawahannya, dan seorang presiden, bupati, gubernur bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya, dan sebagainya.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas dapat diidentifikasi beberapa komponen dalam kepemimpinan yaitu:

1. Adanya pemimpin dan orang lain yang dipimpin atau pengikutnya.
2. Adanya upaya atau proses mempengaruhi dari pemimpin kepada orang lain melalui berbagai kegiatan.
3. Adanya tujuan akhir yang ingin dicapai bersama dengan adanya kepemimpinan itu.
4. Kepemimpinan dapat timbul dalam suatu organisasi atau tanpa adanya organisasi tertentu.
5. Pemimpin dapat diangkat secara formal atau dipilih oleh pengikutnya.
6. Kepemimpinan berada dalam situasi tertentu baik situasi pengikut maupun lingkungan eksternal.
7. Kepemimpinan merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT.⁹

Salah satu masa kepemimpinan yang dianggap memiliki beberapa komponen di atas adalah kepemimpinan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada masanya telah memberi banyak sumbangan terhadap perkembangan peradaban Islam.

Umar bin Abdul Aziz termasuk pembesar Bani Umayyah yang paling mewah gaya hidupnya. Ia makan dan tumbuh dalam suasana kerajaan, tidak mengenal kecuali gaya hidup raja. Wanginya menyengat tercium dari kejauhan, baunya

⁹Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, h. 6.

menempel pada jalan yang dilaluinya. Gaya jalannya dikenal dengan gaya jalan Umar. Para gadis belajar cara jalan itu karena indahnya dan ada lenggang kebesaran yang memukau di dalam cara jalannya itu. Ketika memegang khilafah, ia meninggalkan semua yang ada pada dirinya kecuali gaya jalannya karena dia tidak mampu meninggalkannya. Keadaan mewah terus melekat pada diri Umar sampai dia memegang khilafah. Begitu dibaiat menjadi khalifah, ia meninggalkan semua kemewahan hidupnya, ia hidup zuhud dan menolak kenikmatan dunia.¹⁰

Pemerintahannya membuka suatu pertanda yang membahagiakan bagi rakyat maupun bagi imperium. Ketakwaannya dan kesalehannya patut menjadi teladan, dan kesibukan dalam hidupnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kaum muslimin menganggapnya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Dia merupakan lambang kesederhanaan. Begitu besar kesalehannya sehingga kaum Khawarij yang fanatik sekalipun mengakuinya sebagai salah seorang khalifah yang sah. Khalifah yang saleh dan jujur, sederhana dan keras itu membuka zaman kedamaian dan keadilan.¹¹

Umar sepenuhnya berada di bawah pengaruh para teolog, dan selama berabad-abad dikenal dengan kesalehan dan kezuhudannya berbeda jauh dengan corak pemerintahan Umayyah yang dikenal sekuler karena itulah ia dikenal sebagai Sufinya Dinasti Umayyah. Berdasarkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa setiap seratus tahun akan muncul seorang *mab'uts* (utusan) yang akan memperbaiki agama

¹⁰Abdul Hakam bin Abdullah, *Biografi Umar bin Abdul Aziz* (Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), h. 35.

¹¹Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, (Cet. 4, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005) h. 193.

Islam, ia diyakini sebagai utusan yang lahir di awal abad kedua (100 H), seperti al-Syafi'i yang lahir pada abad ketiga.¹²

Khalifah yang adil ini adalah putra Abdul Aziz, gubernur Mesir. Ia dikenal dengan keadilannya dalam memimpin. Rupanya keadilannya itu menurun dari Khalifah Umar bin Khattab yang menjadi kakeknya dari jalur ibunya.¹³ Meskipun masa kepemimpinannya sangat singkat, namun Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai “lembaran putih” Bani Umayyah, dimana kepemimpinannya mempunyai ciri-ciri tersendiri,¹⁴ memiliki karakter yang tidak terpengaruh oleh berbagai kebijaksanaan daulah Bani Umayyah yang banyak disesali. Ia merupakan personifikasi seorang khalifah yang takwa dan bersih, suatu sikap yang jarang sekali ditemukan pada sebagian besar pemimpin Bani Umayyah.¹⁵

Pada zaman sekarang ini, telah banyak pemimpin yang sejatinya tidak memerankan peranannya sebagaimana mestinya. Pemimpin yang seharusnya bisa memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat, seakan tutup mata dengan beragamnya masalah yang terjadi selama ini. Tentunya hal ini akan berdampak kepada tatanan kehidupan dalam masyarakat. Timbulnya suatu masalah, bukannya diatasi malah pemimpin seakan-akan menambah masalah baru. Hal ini sangat berbeda dengan kepemimpinan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dialah pemimpin yang telah mengajarkan sifat jujur dan adil sehingga dapat dijadikan panutan bagi para pemimpin di masa kini yang seolah-olah sudah tidak menjunjung lagi nilai keadilan,

¹²Philip K. Hitti, *History Of The Arabs* (Cet. 1, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), 277.

¹³Sulaeman Jajuli, *Sejarah Peradaban Islam*, (Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 119-120.

¹⁴A Syalabi, *Sejarah Peradaban Islam 2* (Cet. 10, Jakarta: PT Pustaka Al Husna baru, 2003), h. 81.

¹⁵Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet. 3, Jakarta: AMZAH, 2013), h. 126.

serta memberikan pembuktian atas apa yang diiming-imingkannya kepada masyarakat sebelum memangku jabatan pemimpin.

Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam memimpin tidak terlepas dari gaya kepemimpinannya sehingga sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam. Sebab untuk maju mundurnya suatu organisasi yang dipimpin tergantung dari gaya kepemimpinan setiap pemimpin, baik dalam proses mempengaruhi, mengarahkan dan memberikan pengaruh agar tujuan bisa tercapai. Di samping itu setiap kepemimpinan pasti mempunyai dampak atau pengaruh, baik yang sifatnya positif ataupun negatif. Inilah yang akan mempengaruhi setiap segi kehidupan masyarakat ataupun suatu bangsa, khususnya dalam bidang sosial politik. Maka dari itu untuk mengkaji dampak dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tidak dapat terlepas dari sejarah latar belakang kehidupannya, karena kepemimpinan pada umumnya dilahirkan oleh suatu sistem sosial. Kepemimpinan yang dilahirkan itu merupakan faktor penyebab kelahiran sistem baru, bahkan pemimpin sejati mendapatkan kursi kepemimpinannya bukan karena pengaruh keturunan tetapi pengaruh lingkungan. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa kepemimpinan muncul melalui proses.¹⁶

Dengan demikian, penulis akan menelusuri lebih mendalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terkait dampak yang ditimbulkannya terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

¹⁶Umar Prasetyo. 2018. *Kepemimpinan Spiritual Umar bin Abdul Aziz*. Semarang : Skripsi Sarjana Fakultas Ushuluddin dan Humaniora.

Agar lebih sistematis dalam memahaminya, maka masalah pokok di atas dibagi menjadi beberapa sub masalah sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana biografi Umar bin Abdul Aziz?
- 1.1.2 Bagaimana situasi sosial politik Islam sebelum masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz?
- 1.1.3 Bagaimana dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M)?

1.3 Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang ingin dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Sama halnya dengan penelitian ini juga mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui biografi Umar bin Abdul Aziz.
- 1.3.2 Untuk mengetahui situasi sosial politik Islam sebelum masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).
- 1.4.2 Dapat dijadikan rujukan untuk mendapatkan informasi tentang tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.4.3 Diharapkan hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang akan datang.

1.5 Defenisi Istilah/Pengertian Judul

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

1.5.1 Defenisi Dampak Kepemimpinan

1.5.1.1 Defenisi Dampak

Definisi dampak secara istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti benturan, pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat, baik itu positif maupun negatif.¹⁷ Penggunaan kata dampak biasanya disertai dengan kata imbas yang disampaikan pada akhir kalimat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dampak merupakan akibat atau imbas yang terjadi (negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu.

1.5.1.2 Defenisi Kepemimpinan

Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata dasar *pemimpin*. Dalam bahasa Inggris, *leadership* yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar *leader* yang berarti pemimpin dan akar katanya *to lead* yang terkandung beberapa arti yang berhubungan erat: bergerak lebih awal, berjalan lebih awal, mengambil langkah awal, berbuat paling dulu, mempelopori, mengarahkan pikiran, atau pendapat orang lain, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya.¹⁸

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Ed. 4, (Cet. 1, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 290.

¹⁸Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam: Antara Teori dan Praktik*, (Cet. 1, Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2012), h. 47.

Definisi kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kepemimpinan merupakan proses membimbing dan menuntun orang lain atau dalam lingkup organisasi yang sifatnya mempengaruhi dalam hal memperbaiki tatanan kelompok dan budayanya serta memotivasi perilaku dalam mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan beberapa defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dampak kepemimpinan merupakan akibat atau imbas yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam proses mempengaruhi ataupun membimbing dan menuntun suatu organisasi atau lingkup masyarakat.

1.5.2 Umar bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke- 8 dalam Dinasti Umayyah yang memimpin pada tahun 99-101 H/717-720 M. Ia lahir pada 26 Safar 63 H di Madinah, sumber lain menyatakan bahwa Ia lahir di Mesir. Ayahnya adalah Abdul Aziz bin Marwan, gubernur Mesir pada 686 sampai wafatnya pada 705. Ayahnya adalah putra khalifah Marwan bin al-Hakam yang merupakan sepupu khalifah Usman bin Affan. Ibunya adalah Laila binti Asim bin Umar, cucu dari khalifah Umar bin Khattab. Ia meninggal pada 110 H(720 M).²⁰

1.5.3 Defenisi Sosial Politik Islam

Istilah sosial politik terdiri dari tiga kata, yaitu sosial, politik dan Islam. Kata sosial dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna sesuatu yang

¹⁹Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, h. 2.

²⁰<https://id.m.wikipedia.org/wiki> (diakses pada 7 Agustustus 2018).

berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menolong, menderma, dan sebagainya.²¹ Jadi dapat dipahami bahwa, sosial merupakan sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dengan sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

Sedangkan Istilah politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti kota, negara kota.²² Kota diartikan sebagai negara yang memiliki kekuasaan dengan adanya pemerintah yang sah dan adanya masyarakat. Dari bahasa Inggris, yaitu *politia*, yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Sedangkan secara lughah, politik berasal dari kata '*saasa-yasuusu-siyasatan*', yang berarti mengurus kepentingan seseorang.²³ Maka dapat disimpulkan bahwa, politik merupakan sifat atau kekuasaan seseorang dalam hal mengurus kepentingan sebuah negara.

Kata Islam, dimaknai sebagai nilai-nilai moral dalam ajaran Islam yang mementingkan kepentingan ummat daripada kepentingan pribadi dan kekuasaan hanyalah alat yang yang digunakan untuk kemaslahatan umat.²⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, sosial politik Islam adalah segala sesuatu yang menghubungkan antara sifat kemasyarakatan dengan hal kekuasaan, pemerintahan, rakyat, dan semua tanggung jawab tanpa menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam.

1.6 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan literatur yang berkaitan dengan judul skripsi yang ditulis sebagai acuan. Adapun literatur yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini diantaranya:

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1331.

²²Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik*, (Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2010), h. 10.

²³Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, Cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 80.

²⁴Fajriuddin Muttaqin, dkk. *Sejarah Pergerakan Nasional*, (Bandung: Humaniora), h. 116.

1.6.1 Penelitian yang dilakukan oleh Luluk Junaidi Khoirul Huda dengan skripsi yang berjudul “*Pendidikan Nilai Pada Kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)*”.²⁵ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan nilai yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dapat dikelompokkan menurut pengelompokan nilai serta metode-metode pendidikan yang diajarkan dalam Islam. Seperti; nilai keimanan, nilai sosial, nilai akhlak, nilai syariat, dan pendidikan akal kecerdasan.

Penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti sebelumnya yang berfokus pada pendidikan nilai dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sedangkan dalam penelitian ini lebih berfokus pada dampak dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-110 H/717-720 M).

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Wahyuningsih dengan judul skripsi “*Analisis Sejarah Sosial Terhadap Materi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam VII Madrasah Tsanawiyah*”.²⁶ Pada penelitian ini Fitria Wahyuningsih membahas tentang sejarah sosial pada aspek perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dari kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz, diantaranya: menyetarakan kedudukan antara kaum mawali dengan kaum muslim Arab baik hak maupun kewajiban; perubahan kehidupan rakyat non muslim yang mendapatkan

²⁵Luluk Junaidi Khoirul Huda. 2007. *Pendidikan Nilai Pada Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz (Studi Analisis Metode Pendidikan Islam)*. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Tarbiyah.

²⁶Fitria Wahyuningsih. 2016. *Analisis Sejarah Sosial Terhadap Materi Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz Pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam VII Madrasah Tsanawiyah*. Malang: Skripsi Sarjana Jurusan Pendidikan Agama Islam.

kembali tempat beribadatnya; beberapa kalangan yang pajaknya dikurangi bahkan dihapus, yakni pengurangan pajak tambahan bagi petani dan pedagang, penghapusan *jizyah* bagi kaum mawali, pembayaran *jizyah* bagi kaum mawali, pembayaran *jizyah* bagi non muslim disesuaikan dengan kekayaan.

Penelitian sebelumnya memiliki kemiripan dalam hal materi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Namun letak perbedaannya yaitu, peneliti sebelumnya berfokus pada analisisnya terhadap kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz pada buku ajar sejarah kebudayaan Islam VII Madrasah Tsanawiyah.

1.6.3 Penelitian Muhamad Abdul Aziz Wibowo dengan judul skripsi “*Komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz*”.²⁷ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi Umar bin Abdul Aziz lebih menggunakan model komunikasi Aristoteles. Adapun metode dakwah yang digunakannya lebih banyak menggunakan metode dakwah bil-hikmah. Sementara bentuk dakwah yang lebih digunakan Umar bin Abdul Aziz adalah bentuk dakwah bil-hak.

Penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Letak perbedaannya yaitu, dimana peneliti sebelumnya berfokus pada kajian komunikasi dakwah dari kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz, sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada dampak yang ditimbulkan dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-110 H/717-720 M).

²⁷Muhamad Abdul Aziz Wibowo. 2018. *Komunikasi Dakwah Kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz*. Lampung: Skripsi Sarjana Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.

1.7 Landasan Teoretis

1.7.1 Teori Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik atau “*public policy*” merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat pemerintah. Chandler dan Plano mengemukakan bahwa, kebijakan publik adalah pemanfaatan strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Bahkan, mereka juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan tidak semata dilihat sebagai pemanfaatan strategis dari sumberdaya tetapi juga memiliki dimensi moral yang sangat mendalam bahkan sangat menentukan.²⁸

Pada umumnya, bentuk kebijakan dapat dibedakan atas beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut:

1. Bentuk *Regulatory*, yaitu yang mengatur perilaku orang
2. Bentuk *Redistributive*, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan yang ada lalu memberikannya kepada yang miskin. Atau bisa disebut sebagai mengembalikan kewenangan dan atas suatu objek atau sumberdaya
3. Bentuk *Distributive*, yaitu melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya tertentu, pembagian kewenangan atas suatu objek dengan dasar kebijakan membuat kewenangan atas suatu barang terbagi dengan maksud tertentu

²⁸Jeane Elizabeth Langkai, *Kebijakan Publik*, Ed. 1, (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), h. 24.

4. Bentuk *Constituent*, yaitu yang ditujukan untuk melindungi negara. Bisa juga berupa kebijakan pertahanan, kedaulatan negara dan lain-lain.²⁹

Berdasarkan dari beberapa bentuk di atas, dapat dipahami bahwa masing-masing bentuk ini merupakan tujuan dan target suatu program atau proyek sebagai wujud nyata dari suatu kebijakan dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan tersebut.

Adapun James Anderson membagi tiga model dalam menganalisis kebijakan publik, diantaranya sebagai berikut:

1. Model Rasional Komprehensif

Menurut Hoogerwerf model analisis kebijakan rasional komprehensif adalah salah satu analisis dari sudut hasil atau dampak yang memiliki maksud bahwa proses perumusan kebijakan publik itu akan membuahkan hasil atau dampak yang baik kalau didasarkan atas proses pemikiran yang rasional yang didukung oleh data atau informasi yang lengkap (komprehensif). Penganalisaan dilakukan dengan teliti, cermat, dan detail dengan memanfaatkan sejumlah besar data/informasi yang harus dikumpulkan hingga membuahkan hasil dalam bentuk keputusan/kebijakan yang memberi dampak positif. Adapun karakteristik dari dari model rasional komprehensif adalah sebagai berikut:³⁰

1. Penentuan nilai-nilai dan tujuan-tujuan berbeda dan biasanya merupakan prasyarat untuk mengadakan analisis empiris terhadap alternatif-alternatif kebijakan
2. Perumusan kebijakan bisa melalui analisis cara dan tujuan
3. Penilaian terhadap suatu kebijakan dapat dilihat dari ketepatan cara-cara yang digunakan untuk tujuan yang diinginkan

²⁹Jeane Elizabeth Langkai, *Kebijakan Publik*, h. 25.

³⁰Udin B. Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, Cet. 1, (Makassar: CV Sah Media, 2017), h.

4. Analisis yang dilakukan secara paripurna (komprehensif) sehingga setiap faktor yang relevan dan penting harus dipertimbangkan dengan seksama

Menurut Yehezkel Dror, salah satu penganut model rasional komprehensif, mengatakan bahwa setiap pembuat kebijakan harus memiliki kriteria sebagai berikut:

5. Mengetahui semua nilai-nilai utama yang ada pada masyarakat
6. Mengetahui semua alternatif kebijakan yang tersedia
7. Mengetahui semua konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan
8. Menghitung rasio antara tujuan dan nilai-nilai sosial yang dikorbankan bagi setiap alternatif kebijakan
9. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.³¹

2. Model Inkremental

Model ini dicetuskan oleh Charles E. Linblom yang menjelaskan mengenai proses pembuatan keputusan dengan model yang disebut “*disjointed incrementalism*” atau disebut dengan model inkremental. Inkremental diartikan sebagai kebijakan yang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Model ini memandang kebijakan sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit demi sedikit. Adapun karakteristik model inkremental sebagai berikut:

1. Pemilihan nilai-nilai dan tujuan-tujuan disatu pihak serta menganalisis empiris terhadap tindakan yang diperlukan dipihak lain tidak dibedakan satu sama lain tetapi saling berkaitan
2. Karena sarana/cara dan tujuan tidak dapat dipisahkan maka analisis cara/sarana dan tujuan seringkali tidak tepat atau terbatas

³¹Udin B. Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, h. 72.

3. Penentuan atas suatu kebijakan yang dapat dikatakan “baik” adalah bila berbagai pembuat kebijakan memberikan kesepakatan secara langsung terhadap kebijakan yang dibuat (kendatipun mereka tidak sepaham tentang cara/sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan tersebut
4. Analisis dibatasi secara drastis yaitu dengan mengabaikan; 1) kemungkinan-kemungkinan untuk memperoleh hasil yang paling baik/sepurna, alternatif-alternatif kebijakan yang paling potensial, 2) nilai-nilai yang paling berpengaruh, dan 3) serangkaian kegiatan membandingkan kebijakan yang lama dengan yang baru.³²

Hal yang paling mendasar dari model inkremental adalah dari adanya keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam pembuat keputusan, maka model inkremental hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi atas kebijakan yang ada sebelumnya. Yang menjadi landasan pembuat kebijakan publik adalah pada hasil evaluasi dan analisis empiris terhadap program-program dan kebijakan-kebijakan publik yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan hanya menambah, mengurangi dan memodifikasi program dan kebijakan publik tadi secara sedikit demi sedikit untuk dipakai sebagai dasar pembuatan kebijakan yang baru. Dengan kata lain, kebijakan baru adalah variasi dari kebijakan sebelumnya.

3. Model Gabungan/Mixed

Model ini adalah gabungan dari model rasional dan model inkremental. Dilihat bahwa kedua model tersebut sama-sama memiliki kekurangan yang cenderung membuat pengambilan keputusan tidak rasional dan tidak efisien. Oleh karena itu, seorang ahli sosiologi yang bernama Amitai Etzioni yang mempelajari

³²Udin B. Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, h. 74.

kedua model tersebut mencetuskan suatu model kebijakan hibrida yang merupakan gabungan/campuran unsur-unsur kelebihan dari kedua model tersebut. Model ini disebut *mixed scanning*, yang artinya pengamatan gabungan/campuran. Menurutnya kelebihan dari model ini adalah setiap elemen/unsur pada masing-masing jenis keputusan (fundamental/inkremental) cenderung saling menciptakan keseimbangan terhadap masing-masing kekurangan.³³

Etziomi membedakan dua jenis keputusan-keputusan yaitu; 1) *Contextuating/fundamental decisions*, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat melalui suatu penjelajahan terhadap alternative utama yang dilihat oleh pembuat keputusan sesuai dengan konsepsi tujuan yang akan dicapainya, 2) *Bit (in mental) decisions*, yaitu keputusan-keputusan yang dibuat secara inkremental yang didasarkan atas keputusan-keputusan fundamental yang telah dibuat sebelumnya.

Adapun kelebihan dan kekurangan dari model gabungan ini menurut Hartle, bahwa yang menjadi kelebihan dari model ini yaitu, memiliki potensi yang lebih besar untuk mewujudkan tujuan-tujuannya dan mampu mempengaruhi model rasionalisme dan inkrementalisme, sedangkan kelemahannya adalah model gabungan ini sedikit sekali memberikan petunjuk untuk menentukan apakah sebenarnya yang dapat membetuk/menjadikan masalah yang fundamental atau masalah inkremental itu. Pemisah batas antara keputusan-keputusan yang fundamental dari inkremental bersifat sangat subyektif dan harus dilakukan secara hati-hati.³⁴

Berdasarkan dari beberapa model kebijakan publik di atas, dapat dipahami bahwa ketiga model kebijakan publik tersebut, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Salah satu dari ketiga model kebijakan publik ini,

³³Udin B. Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, h. 76.

³⁴Udin B. Sore dan Sabirin, *Kebijakan Publik*, h. 76.

yang akan digunakan untuk menganalisis kebijakan dari Umar bin Abdul Aziz adalah model inkremental. Model inkremental dianggap relevan dengan penelitian ini karena dalam model ini, kebijakan dianggap sebagai suatu kelanjutan kegiatan-kegiatan pemerintah di masa lalu dengan hanya menambah atau merubahnya (modifikasi) sedikit demi sedikit. Hal inilah yang akan dianalisis oleh peneliti, seperti apa kebijakan yang telah ada sebelum masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, dan apakah dari kebijakan tersebut dilanjutkan, ditambah, atau bahkan dirubah oleh Umar bin Abdul Aziz

1.7.2 Teori Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi kondisi lingkungan sekitarnya. Salah satu teori kepemimpinan yang dikemukakan oleh Veryard Projects Ltd. dan Antelope Projects Ltd. adalah teori kontingensi (*contingency theories*) atau teori situasional.³⁵ Menurut teori ini, ketika seorang individu bertindak sebagai pemimpin, sebagian besar akan tergantung pada karakteristik situasi di mana dia menjalankan fungsinya. Kepemimpinan yang fleksibel terjadi jika pemimpin telah mempelajari situasi kepemimpinan yang dihadapinya, baik kondisi subjektif maupun objektifnya. Setelah dipertimbangkan, barulah ditentukan karakteristik dan gaya kepemimpinan yang selaras dan tepat sesuai dengan kondisi.³⁶

Dalam teori kepemimpinan kontingensi, dikenal beberapa gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang dimaksud adalah teori kepemimpinan dari pendekatan perilaku pemimpin. Dari satu segi, pendekatan ini lebih difokuskan pada

³⁵H. A. Hamdan Dimiyati, *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014). h. 58.

³⁶M. Chazienuh Ulum, *Leadership*, Cet. 1, (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), 2012), h. 6.

gaya kepemimpinan (*leadership style*), sebab gaya kepemimpinan merupakan bagian dari pendekatan perilaku pemimpin yang memusatkan perhatian pada proses dinamika kepemimpinan dalam usaha mempengaruhi aktivitas individu untuk mencapai suatu tujuan dalam situasi tertentu. Namun, gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin yang dapat mempengaruhi bawahannya. Perwujudan tersebut biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu.³⁷

Teori kepemimpinan meliputi tiga dimensi kemungkinan situasi yang dapat mempengaruhi efektivitas kepemimpinan, yaitu:

1. Hubungan pemimpin dengan anggota meliputi tingkat keyakinan, kepercayaan, dan aspek baahan terhadap pemimpin
2. Struktur tugas meliputi tugas pekerjaan terstruktur atau tidak terstruktur
3. Kekuasaan jabatan meliputi tingkat seorang pemimpin mempunyai variabel, seperti mempekerjakan, memecat, mendisiplinkan, mempromosikan, dan menaikkan gaji.³⁸

Gaya kepemimpinan yang paling efektif adalah yang berbeda-beda sesuai dengan kematangan bawahan. Kematangan atau kedewasaan bukan sebagai stabilitas usia atau emosional, melainkan sebagai keinginan untuk berprestasi, kesediaan untuk menerima tanggung jawab, dan kemampuan serta pengalaman yang berhubungan dengan tugas. Ketika proses kepemimpinan berlangsung, pemimpin mengaplikasikan suatu gaya kepemimpinan tertentu. Secara umum beberapa gaya kepemimpinan dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut.

³⁷Baharuddin dan Umiarso, *Kepemimpinan Pendidikan Islam*, h. 51.

³⁸H. A. Hamdan Dimiyati, *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*, h. 59.

1. Gaya berorientasi pada tugas (*task oriented*), yang cenderung sebagai gaya otoriter.
2. Gaya berorientasi pada orang (*people oriented*) yang cenderung sebagai gaya demokratis.
3. Gaya berorientasi pada kombinasi keduanya (tugas dan orang), yang cenderung sebagai gaya moderat.³⁹

Berdasarkan gaya kepemimpinan kontingensi di atas, ketiga gaya ini akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut.

1) Gaya kepemimpinan otoriter

Kepemimpinan otoriter disebut juga kepemimpinan diktator atau direktif. Orang yang menganut pendekatan ini mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan para bawahannya yang harus melaksanakannya atau seseorang yang akan dipengaruhi keputusan tersebut.⁴⁰ Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah-perintah, paksaan, dan tindakan-tindakan yang arbitrer (sebagai wasit). Ia melakukan pengawasan yang ketat, agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Kepemimpinannya berorientasi pada struktur organisasi dan tugas-tugas.⁴¹

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan otoriter, sebagai berikut. 1) Wewenang mutlak berada pada pemimpin. 2) Keputusan dan kebijakan dibuat oleh pemimpin. 3) Komunikasi yang berlangsung satu arah. 4) Pengawasan dilakukan secara ketat. 5) Prakarsa dari atas dan tanpa kesempatan bawahan untuk memberikan kesempatan bawahan untuk memberi kesempatan. 6) Lebih banyak kritik daripada pujian yang

³⁹Soekarso dan Iskandar Putong, *Kepemimpinan: Kajian Teoritis dan Praktis*, (Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015),

⁴⁰Ahmad Susanto, *Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, Cet. (Prenada Media, 2016), h. 6.

⁴¹Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Ed. 2, Cet. 10, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), h. 61.

diberikan. 7) Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi sempurna. 8) Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul oleh pimpinan.

Kelebihan gaya kepemimpinan otoriter yaitu: 1) Keputusan dapat diambil secara cepat. 2) Pengawasan lebih mudah dilakukan .

Adapun kelemahan gaya kepemimpinan diktator di antaranya sebagai berikut.

1. Keberhasilan yang dicapai disebabkan oleh ketakutan bawahan terhadap atasannya dan bukan atas dasar keyakinan bersama
2. Disiplin yang terwujud akibat dari dibayang-bayangi oleh ketakutan akan hukuman yang keras, bahkan pemecatan
3. Setiap perbedaan di antara anggota kelompok diartikan sebagai kelicikan, atau pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang telah diberikan
4. Pembatasan inisiatif dan daya pikir anggota sehingga tidak ada kesempatan untuk mengeluarkan pendapat
5. Pengawasan hanyalah berarti mengontrol, apakah segala perintah yang telah diberikan ditaati atau dijalankan dengan baik oleh anggotanya
6. Pemimpin melaksanakan inspeksi, mencari kesalahan, dan meneliti orang-orang yang dianggap tidak taat kepada pemimpin, kemudian mengancam orang-orang tersebut dengan hukuman, dipecat, dan sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang berlaku taat dan menyenangkan pribadinya dijadikan anak emas dan diberi penghargaan.
7. Kekuasaan berlebih ini dapat menimbulkan sikap menyerah tanpa kritik dan kecenderungan untuk mengabaikan perintah dan tugas jika tidak ada pengawasan langsung.⁴²

⁴²H. A. Hamdan Dimiyati, *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*, h. 73.

2) Gaya kepemimpinan demokratis/partisipatif

Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah. Gaya kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama dan terpenting setiap kelompok/organisasi. Pemimpin memandang dan menempatkan orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek yang memiliki kepribadian dengan berbagai aspeknya, seperti dirinya juga. Kemauan, kehendak, kemampuan, buah pikiran, pendapat kreativitas, inisiatif yang berbeda-beda dan dihargai disalurkan secara wajar.⁴³

Adapun ciri-ciri gaya kepemimpinan demokratis sebagai berikut.

1. Semua kebijakansanaan yang terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil berdasarkan dorongan dan bantuan dari pemimpin
2. Lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organinsasi
3. Pemimpin adalah objektif atau *factminded* dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan.⁴⁴

3) Gaya kepemimpinan moderat

Gaya kepemimpinan seblumnya, yaitu demokratis dianggap bukan gaya kepemimpinan terbaik dalam semua situasi. Gaya kepemimpinan yang tepat adalah suatu gaya yang dapat menyatukan tiga variabel situasional, yaitu hubungan pemimpin dan anggota, struktur tugas, serta posisi kekuasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang terbentuk jika posisi kekuasaan itu moderat. Pengembangan baru teori moderat menggambarkan bahwa ada empat tipe

⁴³H. Samsul Nizar dan Zainal Efendi Hasibuan, *Kepemimpinan Pendidikan Dalam Perspektif Hadis*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 74.

⁴⁴H. A. Hamdan Dimiyati, *Model Kepemimpinan & Sistem Pengambilan Keputusan*, h. 75.

atau gaya kepemimpinan, diantaranya: 1) mengarahkan, gaya ini sama dengan gaya otokratis, 2) mendukung, pemimpin bersifat ramah kepada bawahan, 3) berpartisipasi, pemimpin bertanya dan menggunakan saran bawahan, 4) berorientasi pada tugas, pemimpin menyusun serangkaian tujuan yang menantang untuk bawahannya.⁴⁵

Gaya kepemimpinan yang di atas, merupakan serangkaian teori kepemimpinan yang menjelaskan gaya kepemimpinan seorang pemimpin dalam mempengaruhi bawahannya. Pada umumnya dari ketiga gaya kepemimpinan tersebut, memiliki bentuk yang sama dan masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Beberapa gaya kepemimpinan ini akan digunakan untuk mengetahui bagaimana model kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan melihat gaya kepemimpinan yang digunakannya, sehingga dapat diketahui dampak dari kepemimpinannya terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 M/717-720 M).

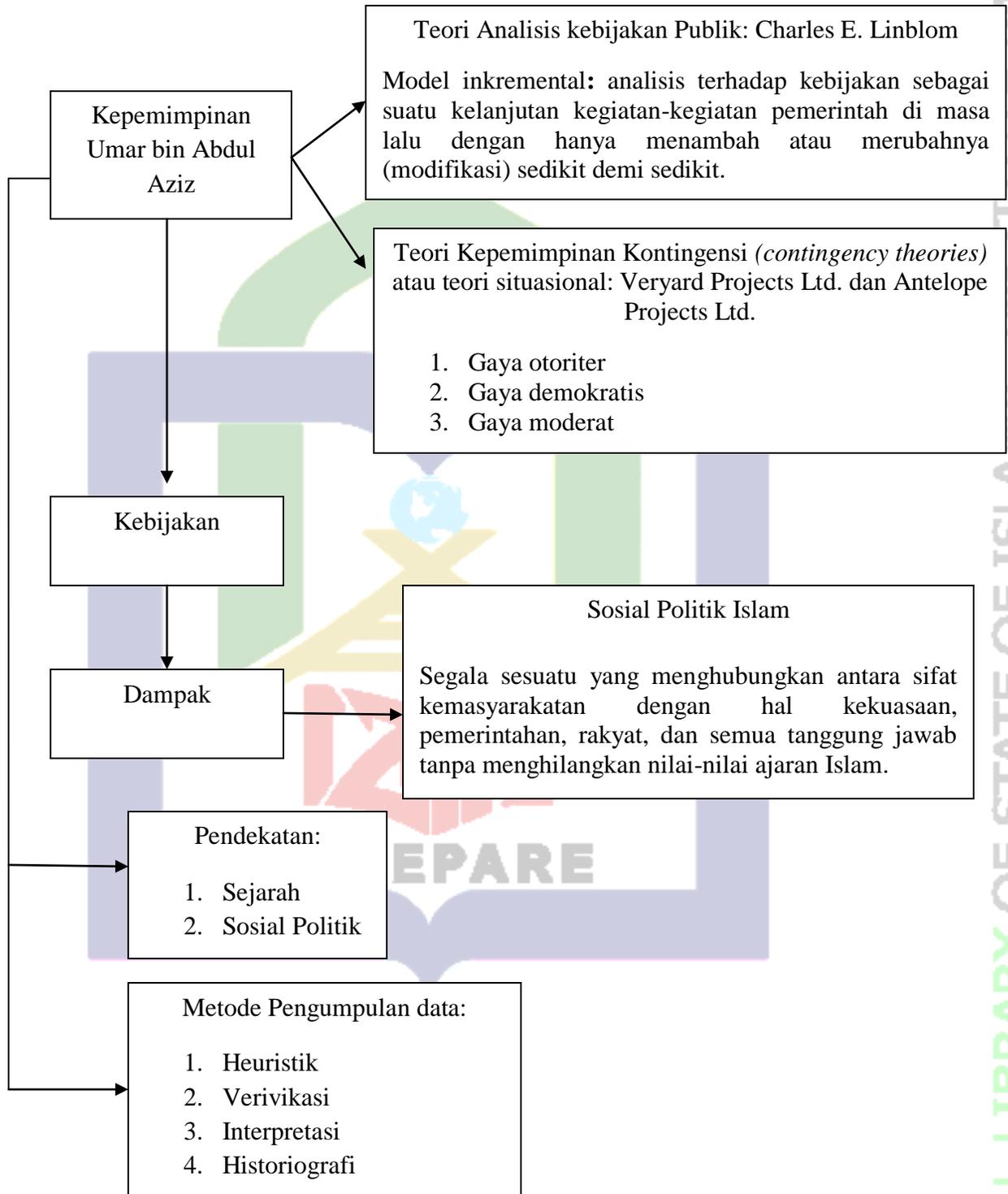
1.7.3 Bagan kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian. Kerangka pikir biasanya dikemukakan dalam bentuk skema atau bagan.⁴⁶

⁴⁵H. Zainuddin Mustafa dan Maryadi, *Kepemimpinan Pelayan: Dimensi Baru Dalam Kepemimpinan*, h. 23-24.

⁴⁶Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Parepare: Departemen Agama, 2013), h. 26.

Kerangka Pikir



Bagan kerangka pikir di atas menjelaskan bahwa, dalam penelitian ini untuk mengetahui kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, digunakan teori analisis kebijakan publik dengan menggunakan model inkremental, dan menggunakan teori kepemimpinan situasional, dengan menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, demokratis, dan moderat.

Adapun dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, terdapat beberapa kebijakan-kebijakan yang diterapkan, dan dari kebijakan itu akan dilihat bagaimana dampak atau pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perkembangan sosial politik Islam. Sosial politik Islam sendiri merupakan suatu proses yang menghubungkan antara sifat kemasyarakatan dengan hal kekuasaan, pemerintahan, rakyat, dan semua tanggung jawab tanpa menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini yang ingin dilihat adalah perkembangan sosial politik pada masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis atau sejarah dan pendekatan sosial politik. Pendekatan sejarah digunakan untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa masa lampau. Sedangkan pendekatan pendekatan sosial politik adalah usaha yang digunakan untuk melihat fenomena atau gejala masyarakat dengan sistem politiknya dalam hal pembentukan kekuasaan ataupun pembuatan keputusan dalam sebuah negara yang dipimpinnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (analisis), dan historiografi (penyajian).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang dalam proses pengambilan datanya melalui proses *Library Research* (penelitian pustaka) yaitu cara pengumpulan data dengan jalan membaca atau menelaah buku-buku, jurnal, skripsi, dan media internet atau literatur naskah yang sudah ditransliterasi dan diterjemahkan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.⁴⁷ Dari hasil bacaan berupa buku-buku ataupun referensi lainnya akan ditulis atau dirangkum dalam sebuah kartu-kartu yang berisi catatan-catatan berupa kutipan langsung dan ikhtisar. Sehingga dapat diketahui suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi di masa lalu yang dialami oleh manusia baik secara pribadi maupun secara kelompok terkait dampak dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan sudut pandang atau cara melihat dan melakukan sesuatu masalah yang dikaji.⁴⁸ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.8.2.1 Pendekatan Sejarah

Sejarah atau historis adalah suatu ilmu yang di dalamnya membahas berbagai peristiwa dengan mempertemukan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut.

⁴⁷S. Nasution, *Metode Research: penelitian ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 145.

⁴⁸U. Maman Kh., *Metodologi Penelitian Agama; Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006, h. 94.

Pendekatan historis yaitu usaha untuk mempelajari dan mengenali fakta-fakta dan menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau. Pendekatan historis mampu menyajikan satu perspektif yang diperlukan bagi studi-studi yang sama baik dalam pengertian kontekstual maupun temporal. Sehingga dapat diketahui apakah terdapat kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis⁴⁹ yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga dapat diketahui dampak dari kepemimpinannya terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.8.2.2 Pendekatan Sosial Politik

Istilah sosial politik terdiri dari dua kata, yaitu sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kelompok-kelompok sosial, dan tingkah laku individu baik individual maupun kolektif dalam konteks sosial.⁵⁰ Sedangkan politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.⁵¹

Sosial dan politik memiliki hubungan yang sangat erat. Dunia politik pasti berhubungan dengan dunia sosial masyarakat. Masyarakat menjadi penghubung antara sosial dan politik itu sendiri. Di dalam kegiatan politik, kita tidak bisa lepas dari partisipasi masyarakat karena masyarakatlah yang menjadi pelaku politik tersebut. Begitu juga sebaliknya kita tidak bisa lepas dari unsur-unsur politik. Jadi, keduanya masing-masing saling memiliki keterkaitan.

⁴⁹Abudin Nata, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Cet. 18, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)h. 47.

⁵⁰Herabuddin, *Pengantar Sosiologi*, (Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 19.

⁵¹Gunardo R.B, *Geografi Politik*, (Yogyakarta: Ombak,), h. 33.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendekatan sosial politik adalah usaha yang digunakan untuk melihat fenomena atau gejala masyarakat dengan sistem politiknya dalam hal pembentukan kekuasaan ataupun pembuatan keputusan dalam sebuah negara yang dipimpinnya. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana fenomena masyarakat dengan sistem politiknya dalam masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, sehingga dapat diketahui dampak dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

1.8.3.1 Heuristik

Kata *heuristik* berasal dari kata "*heuriskein*" dalam bahasa Yunani yang berarti mencari atau menemukan. Dalam bahasa Latin, heuristik dikatakan sebagai *ars inveniendi* (seni mencari) atau sama artinya dengan istilah *arts of invention* dalam bahasa Inggris.⁵² Jadi, heuristik merupakan cara atau proses dalam pengumpulan sumber sejarah berupa catatan, kesaksian, dan fakta-fakta lain yang dapat memberikan penggambaran tentang sebuah peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia.⁵³

Karena penelitian ini jenisnya kepustakaan, maka pengumpulan sumber akan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi ataupun artikel yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

1.8.3.2 Verifikasi

Sumber-sumber yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian diverifikasi atau diuji melalui serangkaian kritik, baik yang bersifat intern maupun ekstern.⁵⁴

⁵²A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Cet. 2, Yogyakarta: Ombak, 2015), h. 52.

⁵³M . Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar* (Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 219.

⁵⁴M . Dien Majid dan Johan Wahyudi, *Ilmu Sejarah Sebuah Pengantar*, h. 223.

Kritik *intern* dilakukan untuk menilai apakah sumber itu memiliki kredibilitas (kebisaan untuk dipercaya) atau tidak. Sedangkan kritik *ekstern* dilakukan untuk mencari otentitas atau keotentikan (keaslian) sumber.⁵⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kritik sumber digunakan untuk menyaring sumber-sumber data secara kritis, sehingga dapat ditemukan sebuah fakta atau informasi yang akurat atau terpercaya terkait kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dan dampaknya terhadap perkembangan Sosial Politik Islam (99-101 H/717-720 M).

1.8.3.3 Interpretasi

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.⁵⁶ Interpretasi atau penafsiran sejarah sering kali disebut juga dengan analisis sejarah. Analisis adalah mengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Langkah pertama dalam analisis data adalah membagi data atas kelompok atau kategori.⁵⁷ Dalam hal ini penulis berupaya membandingkan data yang ada dan menentukan data yang berhubungan dengan fakta yang diperoleh kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Dalam tahap ini digunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam hal ini penelitian yang berjudul dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M), akan dikemukakan terlebih dahulu tiap-tiap sumbernya kemudian menarik kesimpulan.

⁵⁵Sugeng Priyadi, *Metode Penelitian Pendidikan Sejarah* (Cet. 1, Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 62.

⁵⁶A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, h. 83.

⁵⁷Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 358.

- b. Metode deduktif, yaitu berangkat dari teor-teori yang bersifat umum, untuk menjelaskan kejadian-kejadian yang bersifat khusus. Dalam hal ini peneliti akan memulai suatu gambaran umum kemudian mengakhiri dengan gambaran yang bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yaitu menganalisa dengan jalan mebanding-bandingkan data atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainyya kemudian menarik sebuah kesimpulan.

1.8.3.4 Historiografi

Secara etimologis, historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *historia* dan *grafein*. *Historia* berarti penyelidikan tentang gejala alam fisik (*physical research*), sedangkan *grafein* berarti gambaran, lukisan, tulisan, atau uraian (*discription*). Dengan demikian, secara harfiah historiografi dapat diartikan sebagai uraian atau tulisan tentang hasil penelitian mengenai gejala alam.⁵⁸

Historiografi atau penyajian merupakan tahap akhir dari rangkaian metode penelitian sejarah, dengan merekontruksi data dari sumber-sumber yang telah diseleksi ke dalam bentuk ceritera sejarah dengan kata lain penulisan sejarah atau (historiografi) adalah pelaporan hasil penelitian sejarah.⁵⁹ Dalam tahap ini, akan dilaporkan atau disajikan hasil penelitian tentang dampak kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz terhadap perkembangan sosial politik Islam (99-101 H/717-720 M) dengan menggunakan teknik deskripsi, narasi dan lebih mengutamakan teknik analisis.

⁵⁸H. Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, (Cet. 1, Bandung: CV Pustaka Setia), h. 147.

⁵⁹M.Dien Madjid dan Johan Wahyudhi, *Ilmu Sejarah: sebuah pengantar*, h. 219.